



Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang Perspektif Pemberdayaan Masyarakat

Firman Abadi dan Wakidul Kohar

Dosen pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Email: Firmanabadi601@gmail.com dan wakidulkohar@uinib.ac.id

Abstact

PKH program implementation in Padang City has not been successful, because there are still poverty, malnutrition, mothers died due to childbirth, and low awareness of the community that supports the improvement of welfare. This study aims to find out the planning, implementation of the hope family program in the perspective of community empowerment. Suggestions that can be implemented are evaluating government policies on the implementation of the family of hope program and providing Value to individuals. This research states that: 1. The family of hope program is generally not perfectly successful, but can contribute to the poor. 2. Family hope programs in helping the community's economy include cash assistance programs, complementary assistance to communities, school children, people with disabilities, and pregnant women. 3. The hope of the family program in its use provides support and motivation so that the community can produce and improve the economy. In the perspective of empowerment to the 3 points above from the hope family program, it has fulfilled the terms and conditions in empowering the poor in the city of Padang, the hope family program empowers the community through economic, social, spiritual.

Keywords: *Implementation, Program, Family of hope*

Abstrak

Pelaksanaan program PKH di Kota Padang belum berhasil, karena masih terdapat kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal akibat melahirkan, dan rendahnya kesadaran masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan program keluarga harapan dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Saran yang dapat dilaksanakan adalah mengevaluasi kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan program keluarga harapan dan pemberian Value kepada individu. Penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Program Keluarga Harapan pada umumnya belum sepenuhnya berhasil, tetapi dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat miskin. 2. Program keluarga harapan dalam membantu perekonomian masyarakat meliputi program bantuan tunai, bantuan pelengkap kepada masyarakat, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. 3. Harapan program keluarga dalam pemanfaatannya memberikan dukungan dan motivasi agar masyarakat dapat menghasilkan dan

- 44 Firman Abadi dan Wakidul Kohar, Implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Volume 3 Nomor 1, Desember 2020, h. 43-64

meningkatkan perekonomian. Dalam perspektif pemberdayaan ke 3 poin di atas dari program keluarga harapan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pemberdayaan masyarakat miskin di kota Padang, program keluarga harapan memberdayakan masyarakat melalui ekonomi, sosial, spiritual.

Kata kunci: Implementasi, Program, Keluarga harapan

A. Pendahuluan

Agama Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah tetapi juga memperhatikan kemandirian atau motivasi seseorang dalam hidup atau dengan kata lain pemberdayaan.¹ Diantara masalah yang harus menjadi perhatian khusus dalam Al Qur'an adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu menjadikan seseorang berdaya dalam persoalan yang dihadapinya secara mandiri, dengan maksud agar tidak ketergantungan pada siapapun diluar dirinya atau yang melaksanakan pemberdayaan. Adapun yang harus dilakukan oleh masyarakat yang sudah diberdayakan diantaranya membentuk sebuah kelompok yang mengarahkan dan membimbing jalannya pemberdayaan. Memberikan kendali pemberdayaan pada orang lain dapat menjadikan ketergantungan dan akan merusak daya yang diinginkan.² Seperti Firman Allah (Q.S Ar Ra'd: 2).

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar-Ra'd:11)

Sangat jelas sekali ayat menunjukkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang melainkan dirinya sendirilah yang akan merubah nasibnya tersebut. Contohnya seperti Allah telah mengubah kondisi pasukan uhud yang menang setelah memperbaiki diri mereka sendiri.³ Dalam ayat ini juga terdapat makna kemandirian masyarakat. Karena Tujuan pemberdayaan itu menumbuhkan

¹Nanih Machendarwaty dan Agus Ahmad Safei, *IPengembangan Masyarakat Islam; Dari Ideologi2, Startegi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT, Remaja Rosada Karya, 2001), h.41

²Moeljadi & Pramono, S& Yuniasra, S.O. 2018. *Exsploring Of Coastal Communities And Economic Empowermen To The Environmen Impact In Maritime. International Journal Of Managemen And Business Research*. 8 (2). h.223

³Al. Qurtubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qhurthubi/ Syaikh Imam Al Qhurthubi; Penerjemahan, Muhyiddin Masridha*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.688



kesadaran masyarakat akan perubahan hidup mereka. Nilai tertinggi itu adalah Derajat. Keberdayaan itu adalah kesadaran.⁴ Pemberdayaan dalam pandangan Islam adalah gerakan tanpa henti,⁵ Dalam mengarahkan pola pikir masyarakat pada potensi yang dimiliki dalam dirinya. Agar lebih mandiri dalam hidup, baik sikap, perbuatan dan cara pandangan dalam hidup.⁶

Adapun Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu (KPM). Program PKH adalah program Pemerintah Indonesia yang dimulai semenjak tahun 2007 untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial tentang bantuan kepada masyarakat miskin: sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu masyarakat melalui akses kesehatan dan pendidikan.

Proses pelaksanaan bantuan kemiskinan ini merujuk pada keputusan Menteri "*Peraturan Menteri Keuangan* Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147)"⁷

Perencanaan sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi angka kemiskinan yaitu program PKH (program keluarga harapan)⁸, secara terperinci program ini bertujuan:

1. Untuk membantu masyarakat dalam mensejahterakan keluarga dari segi ekonomi sosial dan pendidikan.
2. Membantu biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁴Firmansyah, *Zakat Sebagai Instrumen Penegnetasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 2013 h. 179

⁵Aprilia thesa dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta*, 2014), h.22.

⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakarn Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h.21

⁷Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

⁸Khdiziah Isnaini Kholif, *Jurnal Admnistarsi Public (JAP)*, Vol.2.No.4.Hal. 709/714/709

3. Masyarakat harus mandiri dengan bantuan pendidikan sosial, ekonomi yang sudah diberikan oleh pemerintah.
4. Menurunkan angka kemiskinan.
5. Produk dan jasa keuangan formal adalah sesuatu yang bermanfaat oleh masyarakat yang harus mereka ketahui.⁹

Sedangkan bentuk-bentuk program PKH dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Jaminan Kesehatan Nasional
2. Bansos Rasta
3. Pemberian sembako
4. Program
5. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
6. Rumah Tangga Layak Huni (RUTILAHU)
7. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
8. Asisten Social Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)
9. Bantuan Sosial Lainnya

Program keluarga harapan (PKH) adalah kegiatan unggulan secara nasional di akui paling cepat dalam mengatasi kemiskinan yang usdah teruji dan terbukti keberhasilannya. Program ini memiliki hasil yang pantas dalam mengurangi kemiskinan dan keluar dari kemiskinan, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁰

Semenjak PKH dijalankan di Indonesia tahun 2017, telah terjadi penurunan kemiskinan seperti dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel I

Angka Kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret dan September 2017

No	Keterangan	Jumlah	Persentasi
1	Penduduk Miskin pada bulan	27.771.220	10,64%

⁹Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2019 h.27

¹⁰Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 h. 9



	Maret 2017		
2	Penduduk Miskin pada bulan September 2017	26.582.990	10,12%

Sumber: Diolah dari data BPS (Tahun 2017).

Sesuai data yang sudah diolah tahun 2017 mampu menggambarkan telah terjadi penurunan angka dan persentase kemiskinan dari “27.771.220 orang penduduk miskin pada bulan Maret berubah menjadi 26.582.990 orang pada bulan September, artinya dari segi angka telah terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 jiwa dan dari 10,64% penduduk miskin pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017, artinya terjadi persentase penurunan penduduk miskin di Indonesia sebesar 0,52 % dalam waktu 7 bulan.

Penurunan angka kemiskinan juga terjadi di Sumatera Barat semenjak PKH dijalankan tahun 2017 sebesar 0,48 persen dari bulan Maret ke bulan September 2017, dibanding Maret 2017.¹¹ Menurut data BPS juga terjadi penurunan angka kemiskinan di Kota Padang pada tahun 2018 yaitu sebanyak 44,04 ribu jiwa penduduk.¹² Berdasarkan data-data yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia, Sumatera Barat dan Kota Padang setelah program PKH dijalankan semenjak tahun 2017.

Kegiatan sosial PKH diperuntukkan pada Keluarga kurang mampu (KPM) yang sudah terdaftar di Direktorat Jaminan Sosial. Keluarga penerima manfaat di Kota Padang itu terdapat pada 11 Kecamatan.

B. Kajian Teori

Kegiatan pemberdayaan (masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapisan bawah secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat senantiasa dilakukan dengan perencanaan yang matang.

Aktivitas Pemberdayaan masyarakat disebutaktif atau efektif bilamana seuruh komponen dapat berfungsi secara keseluruhan dalam mencapai tujuan

¹¹Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang 2017

¹²Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang 2018

yang dimaksud. Hal ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan, diawali dengan perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi kegiatan.¹³ Sama halnya dengan yang disampaikan Mardikanto bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terencana (*Planet change*). Artinya, perubahan tersebut memang menuntut dinamika masyarakat dimasa mendatang.¹⁴ Kegiatan pemberdayaan ini merupakan kegiatan yang sangat positif dalam meningkatkan kualitas masyarakat secara umum, pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa petugas yaitu pendamping sosial, kelompok masyarakat yang dijadikan objek pelaksanaan pemberdayaan, lembaga pemerintah lainnya yang dapat bekerja sama dalam mensukseskan pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, jika aktivitas pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan maka akan dapat diwujudkan perubahan terencana sesuai keinginan atau cita-cita lembaga pemberdayaan masyarakat. Artinya apabila suatu kegiatan itu akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan secara maksimal hendaklah dilakukan serta dikerjakan secara profesional.¹⁵ Sangatlah penting pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan agar tercapai perubahan terencana tersebut.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah cara mengartikan maksud dalam berorganisasi, menjadikan metode dalam menggapai yang diinginkan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.¹⁶ Kegiatan perencanaan pemberdayaan masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Perencanaan Menurut Martines.¹⁷ dalam Mardikanto pemberdayaan pemberdayaan yang bagus itu harus memiliki perencanaan yang matang.

¹³Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 83

¹⁴Zubaedi, *op.cit.*, h. 83

¹⁵ Mardikanto.Totok, *Pemberdayaan Masyarakat, Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 111

¹⁶ Muhtadi, Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), h. 50

¹⁷ Mardikanto.Totok, *op.cit.*, h. 235



Perencanaan itu dalam teori-teori manajemen menurut Terry antara lain dipahami menjadi suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan kenyataan, berkaitan dengan hal-hal akan dilaksanakan dalam mencapai harapan dalam suatu tujuan.¹⁸ Muhtadi menjelaskan, perencanaan adalah proses mengartikan maksud dan tujuan organisasi, serta merancang dan mencari strategi untuk mencapai tujuan itu, seain itu dapat mengembangkan seluruh kegiatan kerja organisasi.

Pernyataan diatas dapat menggambarkan bahwa perencanaan adalah suatu proses pemikiran tentang penentuan pekerjaan dikerjakan untuk masa depandalam menanti tujuan yang sudahbuat. Dengan demikian perencanaanmerupakanhal paling urgen diantara fungsi manajemen, sebabapabilaperencanaan tidak berfungsi maka yang lain tak akan dapat berjalan.

Pada kegiatan pengembangan masyarakat perencanaan yang dimaksud ialah perencanaan sosial. Adapun perencanaan sosial itu merupakan perencanaan mengenai program atau kegiatan pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan dan keluarga berencana.¹⁹Macam-macam perencanaan:

1. Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berwal dari perencana hingga proses evaluasi, perencanaan tahap ini disebut dengan (sistem “*top down planning*”).
2. Perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu program, perencanaan kedua ini disebut dengan sistem (*bottom up planning*)
3. Perencanaan gabungan, gabungan dari kedua sistem ituialah perencanaan yang diambilesuai kebutuhan masyarakat dan program yang diinginkan oleh

¹⁸ Muhtadi, Hermansah, *loc. cit.*, h. 50

¹⁹ Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), Cetakan Pertama, h. 27

masyarakat. Kebutuhan itu adalah hasil pengamatan dilapangan oleh pemerintah kemudian di laksanakan untuk masyarakat terintegrasi atau saling berkaitan.²⁰

4. Pergerakan merupakan fungsi terpenting dalam program kegiatan. Bagaimapun baiknya suatu perencanaan, tertipnya organisasi dan tersediannya sumber-sumber tanpa ada fungsi pergerakan semua itu tidak akan berarti apa-apa. Pergerakan itu dapat dilihat apabila perencanaan sudah ditetapkan, maka fungsi pergerakan dapat dilaksanakan dalam proses pemberdayaan.²¹ Rencana yang telah disusun bersama dengan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongrit dengan tetap memperhatikan rencana awal.²²

Dalam konteks pengembangan masyarakat, jenis perencanaan lebih pada model *bottom up* dari pada *top down*. Jenis *top down* kurang memberikan ruang partisipasi pada masyarakat. Sedangkan perencanaan *bottom up* memberikan seluas-luasnya partisipasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, perencanaan *bottom up* dikenal dengan perencanaan partisipatif. Ada 3 hal mendasar yang menjadi sebab perencanaan partisipatif dibutuhkan, yaitu pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhandan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyekproyek akan gagal. Alasan kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Adapun gambaran secara umum perencanaan sosial dan perencanaan partisipatif dapat dirumuskan menjadi lima tahapan²³

²⁰ Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1994), h. 154-155

²¹ *Ibid.*, h. 97

²² Mardikanto.Totok, *Op.Cit.*, h. 126

²³ Suharto, Edi, *op.cit.*, h. 29



- a. Identifikasi masalah
- b. Penentuan Tujuan
- c. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program
- d. Pelaksanaan Program
- e. Evaluasi Program

Sementara itu langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Mardikanto dapat disimpulkan cara perumusan perencanaan program meliputi sembilan tahapan:

- a. Pengumpulan Data Keadaan
- b. Analisa Dan Evaluasi Fakta
- c. Identifikasi Masalah
- d. Pemilihan Masalah Yang Ingin Dipecahkan
- e. Perumusan Tujuan-Tujuan
- f. Perumusan Alternatif Pemecahan Masalah
- g. Penetapan Cara Mencapai Tujuan (Rencana Kegiatan)
- h. Pengesahan Program Pemberdayaan Masyarakat
- i. Perumusan Rencana Evaluasi
- j. Rekonsiderasi

Tahapan di atas adalah tahapan siklikal (*Cyclical*) yang dapat berputar seperti suatu siklus yang berputar seperti spiral guna mencapai perubahan yang lebih baik.

Kegiatan perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan memberdayakan masyarakat merupakan fungsi dan tupoksi sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Perencanaan Menurut Martines²⁴ Perencanaan memiliki arti penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, tanpa adanya perencanaan kegiatan tidak mungkin berjalan dengan baik. Atau pemberdayaan masyarakat itu dilaksanakan dengan baik.

Adapun maksud perencanaan dalam teori manajemen menurut Terry dapat diartikan menjadi kegiatan penarikan kesimpulan berdasarkan kenyataan atau

²⁴ Mardikanto.Totok, *Op.Cit.*, h. 235

fakta, terkait dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.²⁵ Muhtadi²⁶ menjelaskan "Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi". Dari pendapat di atas dapat diketahui perencanaan adalah suatu proses pemikiran tentang penentuan kegiatan selanjutnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian perencanaan adalah hal yang lebih utama dari semua tujuan manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tidak akan dapat berjalan.

Pada kenyataannya dalam pengembangan masyarakat, sistem perencanaan lebih utama digunakan *bottom up* ketimbang *top down*. Karena sistem yang terakhir kurang memberikan manfaat dalam masyarakat. Sedangkan perencanaan *bottom up* banyak memberikan ruang dan partisipasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, sehingga perencanaan *bottom up* disebut banyak memberikan keuntungan pada masyarakat. Tiga alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan, yaitu²⁷ pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhandan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyekproyek akan gagal. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

2. Pelaksanaan

Akar kata pelaksanaan itu adalah laksana, maksudnya ialah kaitan, sifat, dan tanda. Mendapat awalan pe- dan akhiran -an berfungsi dalam menjadikan suatu

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhtadi, Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), h. 50

²⁷ Conyers, Diana, , *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1994), h. 154-155



kata benda menjadi pelaksanaan. Namun, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarmita),²⁸ menemukan batasan terkait pelaksanaan itu lebih awal mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana ialah seseorang yang berbuat serta melakukan rencana yang sudah ada.

Dalam pandangan lain bahwa pelaksanaan yaitu hal perbuatan, proses mewujudkan rancangan. Apabila memandang batasan dikemukakan oleh Purwadarmita di atas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Oleh karena itu pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan Santoso Sastropetro mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Kemudian SP. Siagian menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Menjelaskan rancana sedetil mungking tujuannya untuk menentukan jangka panjang dan jangka pendek dalam sebuah perencanaan serta menentukan dan membuat aturan-aturan sekaligus hal-hal yang bersifat terorganisir.
2. Memberikan tugas dari rencana teknis kedalam rencana paraktis dengan harapan mencari sumber-sumber.

²⁸W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 11 , 2003, h. 553.

3. Memberikan pengawasan (Monitor) monitoring ini dilakukan agar terwujudnya tujuan dan maksud yang diinginkan serta agar tidak terjadi hal teknis tercampur pada hal yang substansi dalam sebuah perencanaan.²⁹
4. Memperhatikan pelaporan dari hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, menganalisis laporan kegiatan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan (Review).

Adapun hal yang paling penting dalam keberhasilan ini adalah mewujudkan faktor pelaksanaan. Maka perlu memperhatikan beberapa hal dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program di dalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik.
3. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
4. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
5. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implementor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Apabila perencanaan sudah ditetapkan, maka fungsi Pelaksanaan program merupakan fungsi terpenting dalam program kegiatan. Bagaimapun baiknya

²⁹The Liang Gie, dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997, h. 191



suatu perencanaan, tertibnya organisasi dan tersediannya sumber-sumber tanpa adanya pelaksanaan semua itu tidak akan berarti apa-apa.³⁰ Rencana yang telah disusun bersama dengan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam pelaksanaan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak. Selain itu diadakan perbaikan jika perlu.³¹ Menurut Edi Suharto ada dua prosedur dalam melaksanakan program, yaitu merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.³²

Inti dari tahapan pelaksanaan program adalah menjadikan suatu kegiatan abstraksi kepada kegiatan yang lebih rendah atau kepada yang lebih kongkrit. Tujuan dari penyelenggaraan program adalah penerapan kebijakan alat dalam mencapai tujuan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

3. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat.

Evaluasi di kehidupan sehari-hari sering disebut sebagai penilaian berupa tindakan dalam menentukan keputusan untuk menilai sesuatu objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Menurut Frutchey (1973) dalam Mardikanto (2008) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan lumrah yang biasa dilakukan sehari-hari dalam lingkup Observasi (pengamatan), yaitu membandingkan hasil penelitian dengan pedoman yang sudah ditentukan kemudian mengambil kesimpulan dari penilaian objek yang diamati tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas evaluasi adalah proses pemeriksaan suatu aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini berguna untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang dilakukan dan juga kegunaan dari evaluasi ini dapat dijadikan tolak ukur untuk tindakan perbaikan selanjutnya.

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dikerjakan dari mulainya acara, terutama pada saat implementasi program. Pemantauan ini bertujuan untuk melihat atau mengawasi

³⁰*bid.*, h. 97

³¹ Mardikanto. Totok, *op.cit.*, h. 126

³² Suharto, Edi, *op.cit.*, h. 29

apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, apabila terjadi penyimpang dapat segera dilakukan perbaikan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang sudah tersusun. Pemantauan juga bertujuan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan tersebut tercapai secara efektif dan efisien.³³ Monitoring dilakukan pada awal kegiatan, terutama saat terjadinya implementasi program. Tujuan lain dari monitoring (pemantauan) yaitu untuk melihat atau mengawasi apakah pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, jika terjadi penyimpang dapat segera diperbaiki.³⁴

Evaluasi dapat pula dilakukan terhadap proses dan hasil implementasi program yang mana bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti (pertriwulan, persemester, pertahun) hingga diakhir kegiatan. Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui sejauhmana pencapaian dari tujuan, apa faktor penghambat dan pendukung serta langkah apa yang perlu diambil guna perbaikan lebih lanjut.

Evaluasi dalam kebiasaannya sering diartikan sebagai penilaian, yaitu satu tindakan mengambil keputusan untuk menilai sesuatu objek, keadaan dan peristiwa, serta kegiatan tertentu yang tengah diamati.

Mardikanto menjelaskan bahwa terdapat dua macam kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proses kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan program sebelumnya. Sedangkan evaluasi hasil yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh tujuan-tujuan yang direncanakan telah tercapai baik dalam pengertian kuantitatif maupun kualitatif.

Sebagian besar kegiatan evaluasi umumnya ditujukan untuk mengevaluasi tujuan program maupun dampak dari kegiatan yang sudah dihasilkan pelaksana

³³ Muhtadi, Hermansah, *op.cit.*, h. 50

³⁴ Mardikanto. Totok, *op.cit.*, h. 265



program (direncanakan). Kegiatan ini dapat berlangsung jika tujuan dari program benar-benar jelas dan telah disediakan cara-cara pengukurannya baik yang menyangkut perubahan perilaku maupun ukuran lainnya. Oleh sebab itu, Rossi 50 menjelaskan bahwa tujuan program tersebut harus cukup jelas serta terumuskan secara operasional agar mudah diukur dan dipahami setidaknya dari setiap pelaksanaan evaluasi tau pasti seberapa tingkat keberhasilannya.

Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian tujuan suatu program, dalam menentukan keputusan lanjut tidaknya suatu program serta diperbaiki atau dihentikan dapat dilihat dari tujuannya untuk mengetahui kondisi suatu kegiatan. Maka dari itu dalam mengevaluasi program, pelaksana harus berfikir menentukan langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan program tersebut. Jadi evaluasi adalah proses pemeriksaan suatu aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi dapat dilakukan untuk mendapatkan data dan fakta, bukan berdasarkan praduga, hal ini berguna untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang dilakukan dapat dijadikan tolak ukur untuk tindakan perbaikan selanjutnya.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisa suatu persoalan tentang apa yang tengah dialami oleh subjek penelitian seperti latar belakang masalah di atas.³⁵ Artinya penelitian ini bermaksud untuk mengamati dan menganalisis bagaimana Implementasi, perencanaan, pelaksanaannya serta evaluasi program PKH di Kota Padang dari perspektif ilmu pemberdayaan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menghasilkan data verbal dalam bentuk lisan maupun tulisan dari beberapa (informan) dan melakukan pengamatan terhadap perilaku mereka.³⁶ Dari Penelitian ini peneliti menganalisis dan menggambarkan secara objektif serta akurat tentang kegiatan

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

³⁶ *Ibid.*

peristiwamaupunkeadaan dalam penelitian.³⁷Peneliti juga berusaha menggambarkan tentang realitas proses pembinaan spiritual masyarakat miskin kota Padang yang dilakukan oleh pendamping sosialprogram PKHmelalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan menggunakan perspektif ilmu pemberdayaan masyarakat.

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu satu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan dan mempertimbangkan secara rasional ciri-ciri khusus informan yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.³⁸ Adapun sumber data yang peneliti gunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data pertama sekali yang didapat langsung oleh peneliti dilapangan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (data mentah). Informan dari penelitian ini adalah pendamping sosial sebanyak 25 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara serta pendamping lapangan lainnya. Koordinator lapangan sebanyak 2 orang, mulai yang bertugas di Kecamatan Kuranji dan di Kecamatan Lubuk Begalung, tokoh masyarakat seperti pengurus masjid, serta masyarakat binaan PKH.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan peneliti guna melengkapi kebutuhan data penelitian.³⁹

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian (responden) yaitu orang-orang yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Penetapan subjek penelitian dilakukan melalui teknik

³⁷Husaini. Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Edisi II, h.130.

³⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2001), h. 134.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h. 129



Purposive Sampling yakni teknik penentuan sampel yang didasarkan atas pertimbangan pelaku riset sesuai dengan maksud dilakukannya riset tersebut.⁴⁰

Berikut ini yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kasi penyelenggara program keluarga harapan Dinas Sosial Kota Padang (4) orang.
2. Pendamping sosial program keluarga harapan (7) orang, sebagai pelaksana lapangan dari program keluarga harapan.
3. Warga penerima(KPM), program keluarga harapan (PKH)di Kota Padang (25) orang sebagai penerima manfaat. Jadi, penulis menetapkan sampel penelitian ini dengan jumlah seluruhnya (36) orang.

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Dalam penelitian penulis berperan aktif sebagai Instrumen kunci dari penelitian dan menjadi partisipan aktif bersama subjek yang diteliti. Beberapa prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan usaha dalam merasakan dan memahami secara sistematis terhadap fenomena berdasarkan pengetahuan yang diketahui sebelumnya guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan. Penulis melakukan observasi dengan penglihatan dan pendengaran.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dalam hal yang diteliti dengan pelaksanaan program keluarga harapan tapi hanya melakukan pengamatan secara pasif. Artinya dalam melakukan observasi peneliti hanya mengamati proses implementasi program keluarga harapan di Kota Padang.

2. Wawancara

⁴⁰Mohammad ali, *Memahami Rist Perilaku Dan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),h. 120

⁴¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.133.

Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya-jawab dengan pengurus PKH, pendamping sosial, tokoh masyarakat dan *masyarakat binaan*. Wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun dalam garis besarnya saja sedangkan pertanyaan yang lebih terperinci dilakukan sesuai dengan perkembangan data di lapangan.

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data dibawah ini:

- a. Untuk Mengetahui Perencanaan Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang.
 - b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang.
 - c. Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang.
3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu satu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen berupa catatan peristiwa yang akurat seperti sumber khusus informasi karangan, tulisan, buku, dan gambar yang digunakan sebagai pelengkap dalam observasi penelitian.⁴² Dalam pengumpulan data peneliti dapatkan dari pedoman wawancara, observasi dan arsip-arsip lainnya seperti dokumen-dokumen mengenai PKH. Dokumen dalam penelitian sangat diperlukan terutama untuk mengetahui program keluarga harapan guna menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan kajian peneliti.

D. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang penulis lakukan ternyata penelitian ini meliputi: Perencanaan (PKH), pelaksanaan (PKH) dan evaluasi (PKH). Untuk lebih jelasnya, maka akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Analisis perencanaan program keluarga harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Padang. (PKH) merupakan bantuan bersyarat untuk masyarakat tidak mampu dalam menangani kemiskinan. Kegiatan ini juga merupakan salah satulangkah

⁴²Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 240.



pemerintah dalam meringankan beban masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan hidup, baik kebutuhan sekolah, kehamilan lansia, disabilitas dan kebutuhan sosial lainnya. Program keluarga harapan dijadikan salah satu alternatif untuk memperbaiki masa depan anak bangsa jadi lebih baik serta membentuk masyarakat yang sehat, berpendidikan dan bermoral.

2. Analisis Pelaksanaan program (PKH) guna melihat apa yang akan dianalisis dari program tersebut yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberdayakan masyarakat, terlebih dahulu penulis mencari apa saja bahagian dari program tersebut. Adapun program keluarga harapan yang terdapat dalam buku panduan mencakup: Program pemberian bantuan tunai kepada masyarakat miskin, anak sekolah, ibu hamil, dan bantuan komplementer lainnya di seluruh kecamatan yang terdaftar sebagai anggota PKH di Kota Padang. *Pertama*, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tunai untuk masyarakat miskin merupakan kewajiban pemerintah guna memperhatikan masyarakatnya. Masyarakat sangat terbantu oleh program keluarga harapan ini. *Kedua*, memberikan bantuan kepada anak sekolah yang miskin karena pendidikan adalah perwujudan yang perlu diperhatikan dalam menggapai cita-cita anak bangsa. *Ketiga*, memberikan bantuan kepada lansia dan disabilitas menjadi suatu bukti bahwa pemerintah sangat mementingkan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kehadiran Program keluarga harapan menjadi suatu harapan bagi lansia dan disabilitas, meskipun sudah ada panti jompo dan lembaga sosial lainnya. *Keempat*, salah satu bentuk kemudahan dalam mengatasi kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dengan cara memberikan sebuah jaminan sosial (*Komplementer*) yang di buktikan dengan memberikan kartu KIP, KIS, PBI dikarenakan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki penghasilan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Analisis Evaluasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kota Padang. *Pertama*, perencanaan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangat baik dan tepat dalam mengeluarkan program pengentasan kemiskinan. Perencanaan

sudah terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, pada pelaksanaan program keluarga harapan berjalan semenjak tahun 2014 di Kota Padang, namun dari hasil penelitian sebagian kecil ada perubahan hidup masyarakat disebabkan karena bantuan yang diberikan. akan tetapi belum semua pelaksanaan program keluarga harapan belum sampai pada tujuan sesuai panduan PKH. Hal ini terbukti bahwa ada kesalahan terhadap penyaluran bantuan, atau sistem yang kurang memadai dari pengelola program keluarga harapan kesalahan itu dapat dilihat dari berbagai macam segi: tidak tepat sasaran, tidak mencukupi bantuan yang diterima, keterlambatan bantuan, kurang Bergeraknya pendamping sosial, serta sulit ditemukan hasil dari program keluarga harapan. *Ketiga* pendamping sosial mengevaluasi program keluarga harapan, dengan cara melihat kelapangan dan mengamati sasaran program keluarga harapan yang telah menerima bantuan, sehingga bantuan tersebut dapat digunakan untuk keperluan sekolah dan kebutuhan bila diperlukan oleh anggota keluarga harapan. Artinya bahwa program keluarga harapan sangat membantu orang-orang yang membutuhkan, tetapi bukan mngentaskan atau mengurangi angka kemiskinan.



Daftar Pustaka

- Al. Qurtubi, syaikh Imam. *Tafsir Al-Qhurtubi/ Syaikh Imam Al Qhurthubi; Penerjemahan, Muhyiddin Masridha*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Aprilia thesa dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta*, 2014)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang 2017
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang 2018
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Conyers, Diana, , *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1994)
- Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1994)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Firmansyah, *Zakat Sebagai Instrumen Penegnetasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 2013
- Husaini. Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Edisi II, h.130.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2001)
- Khdiziah Isnaini Kholif, *Jurnal Admnistarsi Public (JAP)*,Vol.2.No.4.Hal. 709/714/709
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Mardikanto.Totok, *Pemberdayaan Masyarakat, Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Moeljadi & Pramono, S& Yuniasra, S.O. 2018. *Exsploring Of Coastal Communities And Economic Empowermen To The Environmen Impact In Maritime. International Journal Of Managemen And Business Research*. 8 (2)

Mohammad Ali, *Memahami Rist Perilaku Dan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

Muhtadi, Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013)

Muhtadi, Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013)

Nanih Machendarwaty dan Agus Ahmad Safei, *IPengembangan Masyarakat Islam; Dari Ideologi2, Startegi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT, Remaja Rosada Karya, 2001)

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019

Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006)

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), Cetakan Pertama

The Liang Gie, dan sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997

W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 11 , 2003

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktek*,(Jakarta:Kencana, 2013